

SKRIPSI

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

SUHELDA FITRIANI

10973005769



UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

SUHELDA FITRIANI
10973005769



**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : Suhelda Fitriani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dapat melemahkan pemungutan Pajak Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan selanjutnya diambil satu kesimpulan. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk jadi.

Hasil Penelitian ini adalah Dilihat dari proses pendaftaran dan pendataan yang belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian besar dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak melaporkan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dipenda, sehingga wajib pajak hanya menunggu petugas yang akan mendata dan memberi formulir pendaftaran. Dan apabila petugas tidak mendata secara langsung ke lapangan, maka ada kemungkinan wajib pajak tidak akan dikenai pajak. Selain proses pendaftaran dan pendataan, faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak lancarnya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Wajib pajak tidak berada ditempat pada saat petugas melakukan pemungutan, Wajib pajak selalu menunda pembayaran jatuh tempo, dan Wajib pajak mengajukan keberatan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum tercapainya pemungutan pajak daerah sesuai dengan yang diharapkan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tidak konsistennya antara peraturan daerah dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang sebenarnya serta kurang tegasnya petugas dalam menrapkan sanksi sehingga pemungutan jenis pajak daerah di kabupaten kuantan singingi belum terlaksana dengan baik. Hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah karena salah satunya penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah dari setiap jenis pajak daerah.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Pujidan Syukur hanya pantas dihaturkan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam kepada Nabikita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuni-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi yang berjudul “ Analisis Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi “ dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana dan merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, serta Do'a restunya pada setiap langkah dan dorongan baik moral maupun materiil ini

ggaterselesaikannyaskripsiini (kata-kata tidaklahcukupuntukmewakili rasa terimakasihkepadaayahandanibunda).

2. BapakMahendraRomus, SP, M.
EcselakuDekanFakultasEkonomidanIlmuSosialUniversitas Sultan
SyarifKasim Riau.
3. BapakDony Martias, SE, MM, Ketua Jurusan Akuntansi SI Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. BapakAfrizal, S.Sos, M.SiselakuDosenPembimbing yang
telahmemberikanpengarahan, saran sertadukungan yang
berartikepadapenulisselamapenyusunanskripsi.
5. IbuDesrirMiftah, SE, MM, AkselakuPenasehatAkademis yang
telahmemberikanmasukandanarahan yang membangunkepadapenulis.
6. SeluruhDosen-dosenpengajar di JurusanAkuntansi S1
FakultasEkonomidanIlmuSosial.
7. Bapak H. Nafrial, SP, MM selakuKepalaDinasPendapatan Daerah
KabupatenKuantanSingingiatasizinnyamemperbolehkanpenulismelakukanpen
elitan.
8. BapakDediAprianto,
S.SosselakuKasiPendataanPendaftaranDinasPendapatan Daerah
KabupatenKuantanSingingi yang
telahbanyakmembantupenulisdalammendapatkan data-data yang diperlukan.
9. Saudara-Saudaraku (AbangdaDelpiHendrizon, AbangdaSutriWantoni,
AbangdaSupian Joni) danseluruhkeluargakutercinta yang

telah banyak memberikan dukungan,

pengorbanan dan inspirasi selama studi sampai terselesaikannya skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku Yayuk Sugiarti, Lidya Novalinda, Resi Karniadi, Dian PAC, Siti Rabiah, Nurfiyah, Yulia Citra, semua teman-teman Akuntansi A terimakasih banyak atas dukungan, saran, perhatian dan motivasi yang sangat besar kepada penulis.

11. Seseorang yang sangat berharga dalam hidup penulis, Riko Rikardo, terimakasih banyak karena selama ini telah memberikan dukungan, perhatian, serta do'a kepada penulis yang sangat besar selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata,

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang penuh kebaikan dan kebenaran. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

SUHELDA FITRIANI

NIM. 10973005769

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakangMasalah.....	1
1.2. RumusanMasalah.....	14
1.3. TujuanPenelitian.....	15
1.4. Manfaatpenelitian.....	15
1.5. SistematikaPenulisan.....	15
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1.Pajak.....	18
2.2. FungsiPajak.....	19
2.3. PemungutanPajak.....	20
2.3.1. Cara PemungutanPajak.....	21
2.3.2. AsasdanTeoriPemungutanPajak.....	21
2.3.3. SistemPemungutanPajak.....	24
2.4. Pajak Daerah.....	24
2.4.1. DefenisiPajak Daerah.....	24
2.4.2 JenisPajak Daerah.....	26
2.4.3. Subjek, Objek, danWajibPajak Daerah.....	27

2.4.4. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	29
2.4.5. Penetapan Pajak Daerah.....	29
2.4.6. Pembayaran Pajak Daerah.....	31
2.5. Pendapatan Asli Daerah	31
2.6. Tinjauan Pajak Dalam Pandangan Islam.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.2. Jenis dan Sumber Data	36
3.3. Metode Pengumpulan Data	37
3.4. Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah	38
4.2. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah.....	39
4.3. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	40
4.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	43
4.5. Aktivitas Organisasi	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	57
5.2. Kendala-kendala yang melemahkan Pemungutan Pajak Daerah	70
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	74

6.2. Saran	76
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Tanpa adanya pajak, kegiatan negara otomatis sangat sulit untuk dapat dilaksanakan, karena pajak itu sendiri berperan sebagai pedoman negara dalam mencapai tujuan pembiayaan dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak, sehingga sangat diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.

Terkadang, masyarakat wajib pajak tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, karena sebagian besar dari masyarakat wajib pajak tersebut tidak mengetahui tujuan dilaksanakannya pemungutan pajak, sehingga mereka hanya acuh tak acuh dan tidak mau tau masalah pembayaran pajak. Memang ketika membayar pajak, wajib pajak tidak akan mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan oleh pemerintah secara langsung, namun perlu kita ketahui bahwa kewajiban membayar pajak tersebut digunakan untuk keperluan pembiayaan pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, baik itu dari segi rutin maupun pembangunan.

Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil yaitu dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak, pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut di atas maka dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Siahaan (2005:69)

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Menurut Muljono (2010:8), secara umum perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Dirjen Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai APBN. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta Pembangunan Daerah (APBD).

Dalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan pemungutan pajak maupun kendala- kendala yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan pemungutan pajak, masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak menjadi suatu hal yang melemahkan pemungutan pajak baik pemungutan Pajak Pusat maupun Pajak Daerah.

Dasar dilakukan pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi ikut campur, apalagi mendominasi mereka. Pemerintah dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Langkah yang perlu diambil adalah dengan cara menggali segala sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk dapat mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah termasuk didalamnya wewenang konsultasi pajak untuk melakukan tugas serta kewajiban masing-masing daripadamasalah pemerintah daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang diatas.

Menurut Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) Hasil Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Berikut adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2008 sampai dengan 2012.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2008 sampai 2012

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2008	23.680.000.000,-	25.380.245.968,-	107,18
2009	28.105.290.000,-	23.147.073.224,-	82,36
2010	34.305.290.000,-	21.435.798.449,-	62,49
2011	31.226.042.000,-	23.755.740.032,-	76,08
2012	26.169.654.200,-	30.269.207.812,-	115,67

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa jenis Pajak Daerah dirubah lagi, yaitu Pajak

Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota: 1) Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satunya sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang harus diperhatikan atau diupayakan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sektor Pajak Daerah. Dimana pada sektor ini selalu dapat diupayakan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dilihat dari jumlah Pajak Daerah yang dijelaskan Undang-undang No 28 Tahun 2009 adalah sebanyak 11 jenis pajak, namun Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi baru menetapkan pemungutan pajak hanya 8 jenis pajak diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan BPHTB.

Untuk lebih jelasnya tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Tahun 2008 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	200.000.000,-	331.458.250,-	60,33 %
2	2009	265.000.000,-	200.493.690,-	32,17 %
3	2010	265.000.000,-	132.690.375,-	99,71 %
4	2011	291.500.000,-	184.715.000,-	57,81 %
5	2012	291.000.000,-	199.803.000,-	68,54%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam Pembayaran pajak telah dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak hotel sebelum tanggal jatuh tempo dengan membawa bukti rekapitulasi penjualan selama satu bulan yang telah diberikan oleh petugas Dipenda sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat ke dalam buku penerimaan, setelah membayarmaka wajib pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak. Apabila setelah tanggaljatuh tempo wajib pajak belum membayarkan kewajibannya maka akan dikenakan bungasebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang harus dibayar.

Kemudian dalam Penagihan pajak juga dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menagih pajak hotel yang terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak terhitung setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan ini diawali dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak. Apabila setelah 7 hari wajib pajak masih belum membayar kewajibannya maka akan dikeluarkan surat paksa selambat-lambatnya setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Dari pengamatan penulis dalam rangka pemungutan pajak hotel ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya terletak pada penetapan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak. Setelah di keluarkannya perda No 2 tahun 2011 dimana wajib pajak hotel menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya, maka peluang untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar, karena petugas Dipenda hanya menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapatkan setiap bulannya, dari omset itu barulah pihak hotel mengeluarkan pajaknya sebesar 10%.

Sementara untuk pembayaran dan penagihan pajak itu sendiri juga tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan daerah No 02 tahun 2011 dimana, apabila wajib pajak melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari kewajibannya dan apabila dalam waktu 7 hari dari tanggal jatuh tempo tersebut wajib pajak belum memenuhi kewajibannya maka akan diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan apabila masih belum

membayar juga maka akan diberikan Surat Paksa yang berujung pada penyitaan atau penutupan hotel, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pihak Dispenda hanya bisa memberikan peringatan hanya sampai Surat Teguran saja kepada wajib pajak yang tidak taat tanpa memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan yang telah diatur di dalam Perda No 02 tahun 2011 tentang pajak hotel.

Tabel 1.3. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	370.000.000,-	896.099.659,-	242,19 %
2	2009	700.000.000,-	933.480.341,-	133,35 %
3	2010	730.000.000,-	803.965.624,-	110,13 %
4	2011	803.000.000,-	973.455.663,-	121,23 %
5	2012	803.000.000,-	1.645.470.948,-	204,92%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pemungutan pajak restoran bisa dikatakan cukup baik, dimana penerimaan realisasi yang diperoleh selalu dapat mencapai target.

Tabel 1.4. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	7.500.000,-	900.000,-	12,00 %
2	2009	7.500.000,-	8.270.000,-	110,27 %
3	2010	7.500.000,-	2.180.000,-	29,07 %
4	2011	8.250.000,-	75.750.000,-	918,18 %
5	2012	8.250.000,-	54.675.000,-	662,73%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk penerimaan realisasi pajak hiburan, belum bisa dikatakan baik, karena realisasi penerimaan yang diperoleh dari tahun ke tahun masih naik turun.

Tabel 1.5. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	115.000.000,-	110.102.625,-	95,74 %
2	2009	100.000.000,-	146.500.937,-	146,50 %
3	2010	100.000.000,-	157.135.625,-	157,14 %
4	2011	120.000.000,-	300.860.625,-	250,72 %
5	2012	120.000.000,-	119.118.125,-	99,27%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari data pajak reklame, dapat kita lihat penerimaan yang diperoleh sudah dapat mencapai target, namun pada tahun 2012 penerimaan pajak reklame kembali mengalami penurunan.

Tabel 1.6. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	1.575.000.000,-	1.925.423.473,-	122,25 %
2	2009	1.850.000.000,-	2.090.782.411,-	113,02 %
3	2010	1.850.000.000,-	2.870.981.847,-	155,19 %
4	2011	2.525.000.000,-	3.436.815.443,-	136,11 %
5	2012	2.525.000.000,-	6.137.440,249,-	243,07%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel diatas, penerimaan realisasi yang diperoleh Pajak Penerangan Jalan dapat mencapai target dan bahkan dari tahun ke tahun penerimaan realisasi yang dicapai selalu dapat ditingkatkan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diganti dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tabel 1.7. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	285.000.000,-	158.898.387,-	55,75 %
2	2009	280.000.000,-	146.092.314,-	52,18 %

3	2010	280.000.000,-	88.704.058,-	31,68 %
4	2011	308.000.000,-	61.930.829,-	20,11 %
5	2012	308.000.000,-	73.586.315,-	23,89 %

Untuk penerimaan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, penerimaan yang diperoleh tidak dapat mencapai target, bahkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 realisasi penerimaan yang diperoleh selalu mengalami penurunan.

Tabel 1.8. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	-	-	-
2	2009	-	-	-
3	2010	-	-	-
4	2011	-	-	-
5	2012	75.000.000,-	8.532.160,-	11,37 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel di atas, Pajak Air tanah baru di pungut pada tahun 2012, dan realisasi penerimaan yang diperoleh sangat minim yaitu 11,37 %.

Tabel 1.9. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2008 sampai dengan 2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2008	3.646.202.058,-	2.890.362.264,-	79,27 %
2	2009	4.367.729.936,-	2.122.007.470,-	48,58 %
3	2010	3.371.537.146,-	3.251.210.672,-	96,43 %
4	2011	390.529.082,-	-	-
5	2012	250.000.000,-	930.705.400,-	373,29 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Target penerimaan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan seperti yang telah diuraikan dalam tabel tersebut pada tahun 2008 sampai 2009 tidak dapat mencapai target, dan pada tahun 2011 penerimaan realisasi BPHTB tidak dipungut oleh Dipenda.

Dari rincian tabel diatas, yaitu sebanyak 8 (delapan) tabel ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dari setiap jenis pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan terkecuali untuk Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan.
2. Tidak konsistennya pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pihak petugas dengan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

3. Pada tabel target Penerimaan Realisasi Pemungutan BPHTB, untuk tahun 2011 penerimaan realisasi tidak dipungut sementara untuk tahun sebelum dan sesudahnya dipungut oleh Dipenda.
4. Disamping itu, masih ada pajak yang belum dipungut oleh Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya adalah Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menganalisis masalah dari pajak Daerah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Sistem Pemungutan dan Cara Pencatatan serta Perhitungan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dapat melemahkan pemungutan Pajak Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pemungutan dan cara perhitungan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dapat melemahkan pemungutan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Pemungutan Pajak Daerah.
2. Bagi Dipenda, agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagi Peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan tentang ilmu perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi Enam bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data yang telah dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek yang akan diteliti, seperti sejarah Dinas Pendapatan Daerah, kewenangan Dipenda, uraian tugas pokok dan fungsi Dipenda serta aktivitas organisasi Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang telah dilakukan.

BAB VI : PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Menurut Resmi (2009:2) bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Kemudian Supramono (2010:2) mendefenisikan pajak sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Selanjutnya menurut Soemitro dalam Gusfahmi (2007:25) pengertian Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Sedangkan menurut Brotodiharjo dalam Rositawati (2009:31) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Haula (2005 : 39-40) ada beberapa fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi budgetair atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Oleh karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara.

b. Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterapkan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

2.3. Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 49, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.3.1. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2005:16), cara Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel* yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.2. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Menurut Rositawati (2009 : 35) Pemungutan Pajak harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak (Asas Keadilan)

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari.

Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi:

- a. Keadilan Horizontal, wajib pajak mempunyai kemampuan Membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Dalam hal ini adapun teori-teori yang memberikan dasar menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

1) Teori Asuransi

teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya baik itu keselamatan, keamanan jiwa serta harta bendanya.

2) Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya.

3) Teori Gaya Pikul

Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini dapatlah dipergunakan selain

besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelajaran seseorang.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan teori diatas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische steatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan hukum (Asas Yuridis)

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3. Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (Asas Ekonomis)

Selain fungsi Budgetair, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat.

4. Pemungutan Pajak harus sederhana (Asas Finansial)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut Asyhadie (2008:176-177) adalah sebagai berikut:

- a. Official Assesment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. Self Assesment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- c. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

2.4.Pajak Daerah

2.4.1. Defenisi Pajak Daerah

Menurut Muljono (2010:10) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Sedangkan menurut Ilyas dan Bruton (2008 : 13) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota.

2.4.2. Jenis Pajak Daerah

Kriteria Pajak Daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam (empat) hal yakni:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pemerintah daerah. Adapun yang termasuk kedalam jenis Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Provinsi Terdiri Dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten / Kota Terdiri Dari:
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4.3. Subjek, Objek dan wajib Pajak Daerah

1. Subjek Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.

1. Objek Pajak Daerah

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Ketentuan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 tidak secara tegas dan jelas

menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah. Penentuan mengenai objek pajak daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2. Wajib Pajak Daerah

Berdasarkan pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Mardiasmo (2009:21) disebutkan bahwa Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Selain itu pengertian wajib Pajak Daerah juga dijelaskan secara ringkas oleh Fidel (2010:136) yaitu wajib pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang, dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif.

3. Tarif Pajak Daerah

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Tarif Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel 10%
2. Pajak Restoran 10%
3. Pajak Hiburan 35%
4. Pajak Reklame 25%
5. Pajak Penerangan Jalan 10%
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 25%
7. Pajak Parkir 30%
8. Pajak Air Tanah 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4.4. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah pada suatu Kabupaten/Kota menurut Siahaan (2005 : 246) adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 34 Tahun 2000.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota dimaksud.

2.4.5. Penetapan Pajak Daerah

Menurut Sumyar dalam Yani (2012:24) Pelaksanaan penetapan Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pelaksanaan penetapan Pajak Daerah dengan cara penetapan Kepala Daerah, dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Membuat Nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu data.
 - b. Menyerahkan kembali kartu data kepada unit yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan Pajak Daerah selesai.
 - c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - d. Mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak, Seksi Pembukuan, Seksi Penagihan, Seksi Perencanaan Pengendalian Operasional.
 - e. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Pelaksanaan penetapan Pajak Daerah dengan cara dibayar sendiri, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dicatat dalam kartu data.
 - b. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

2.4.6. Pembayaran Pajak Daerah

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dibayar sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membayar Pajak Daerah ke Bendaharawan Khusus Penerimaan.
- b. Wajib Pajak diberi tanda terima yang telah dicap lunas.
- c. Bendaharawan Khusus Penerimaan melakukan pencatatan kedalam buku pembantu penerimaan di buku kas umum.
- d. Bendaharawan Khusus Penerimaan secara periodik setiap bulannya menyerahkan uang kepada Kas Daerah. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan.

2.4.7. Cara Pencatatan dan Perhitungan Pajak Daerah

Dalam hal pemungutan pajak daerah, harus mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, sesuai dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pencatatan dan perhitungan pajak daerah berdasarkan dengan Peraturan Daerah dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Dalam perhitungan pajak daerah, rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang adalah:

Rumus:

$$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, Karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan, semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tingkat II, murni digali dari daerah itu sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prioritas daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan daerah dalam menggali sumber-

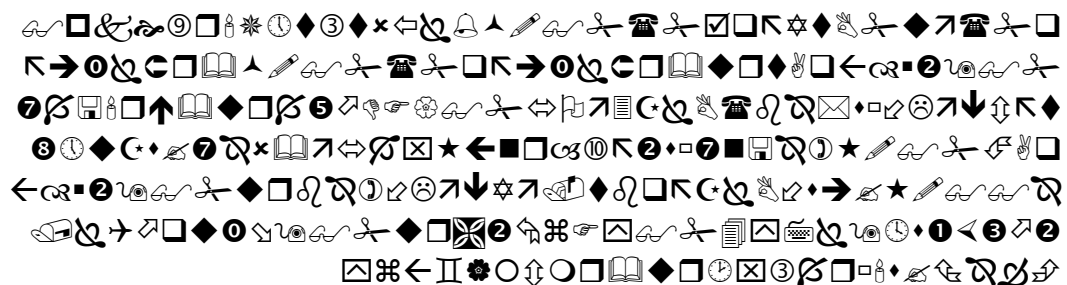
sumber pendapatan sesuai dengan potensinya dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dalam Alamsyah (2011:44) menyebutkan bahwa komponen sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari :

1. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari berbagai komponen, seperti :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.6. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Dalam ajaran Islam banyak ayat Al Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An Nisa ayat 59:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepada Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah (Al-qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (An- Nisa: 59).

Dari berbagai definisi pajak secara umum baik itu dari sektor ekonomis maupun yuridis, di dalam pemahaman Islam (Syariat) juga dijelaskan mengenai pajak seperti yang di uraikan oleh Gusfahmi (2007:27) yaitu sebagai berikut:

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب، يضرب، ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dalam al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]:61:

فَوَقَدْ أَخَذَ آلُ فِرْعَوْنَ أَصْحَابَهُمْ فِي زُرُوعِهِمْ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَرِهُوا لِأَتُوهُمْ فَيَضْرِبُوهُمْ بِالْأَصْوَابِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ ۖ

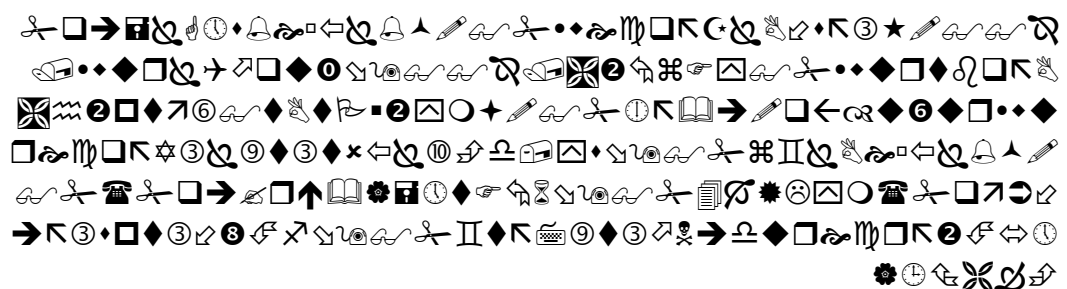
Artinya: *lalu dilimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.*

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* (ذرايب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat,

sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-dharaaib*.

Secara Syar'i zakat berarti kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang sudah *nishab* (batas minimal tertentu) dan haul (dalam waktu tertentu) dalam hal ini zakat *maal* dengan maksud mensucikan diri dan mengharapkan berkah, ridha dan pahala Allah SWT. Faridl(2002:168)

Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 29 ini adalah ayat yang berhubungan dengan pajak :



Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk ”.

Menurut Mufraini (2006:41), Perbedaan cara pandang antara seorang muslim dengan muslim lainnya dalam mengamani pajak akan berimbas kepada cara menghitung keduanya artinya bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi

membayar zakat setelah membayar pajak, sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau sebaliknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2012.

1.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder dimana penulis dapatkan dari pihak secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini, serta melalui Peraturan Perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan laporan yang diperoleh dari bagian keuangan Dipenda dan Perpajakan.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1.4. Analisis Data

Setelah data-data atau bahan yang diperlukan sudah terkumpul, maka penulis dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan diberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Menurut Widi (2010:84), penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Metode deskriptif, menurut Umar (2009:22) dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah singkat berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari awal terbentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada tahun 2058 dan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pusat kepada Daerah Swatantra Tingkat I yang merupakan Daerah Otonomi yang berkedudukan di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra I Riau tanggal 1 September 1958 No. 250/22D/58.

Daerah Swatantra Tingkat I atau salah satunya Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk pada tahun 1963, selanjutnya pada perkembangan Tata Pemerintahan lahirilah Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan mengatur rumah tangganya secara luas. Pada tahun 1999 Perkembangan Pemerintah di Indonesia sedang gencarnya Daerah Kabupaten Tingkat II ingin Daerah tersebut dimekarkan salah satunya Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Undang-undang No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan roda pemerintahannya membentuk beberapa Dinas / Badan yang diantaranya

adalah Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 48 tahun 2001, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2001 dan Kpts. Bupati No. 32 tahun 2002. Organisasi ini mempunyai tugas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah. Terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4).

4.2. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan pengendalian;
2. Pelatihan bidang pendapatan;
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan;
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan
5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan daerah;

8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan;
11. Penyusunan rencana bidang pendapatan;
12. Penyelenggaraan kualitas usaha jasa;
13. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah;
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah; dan
16. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

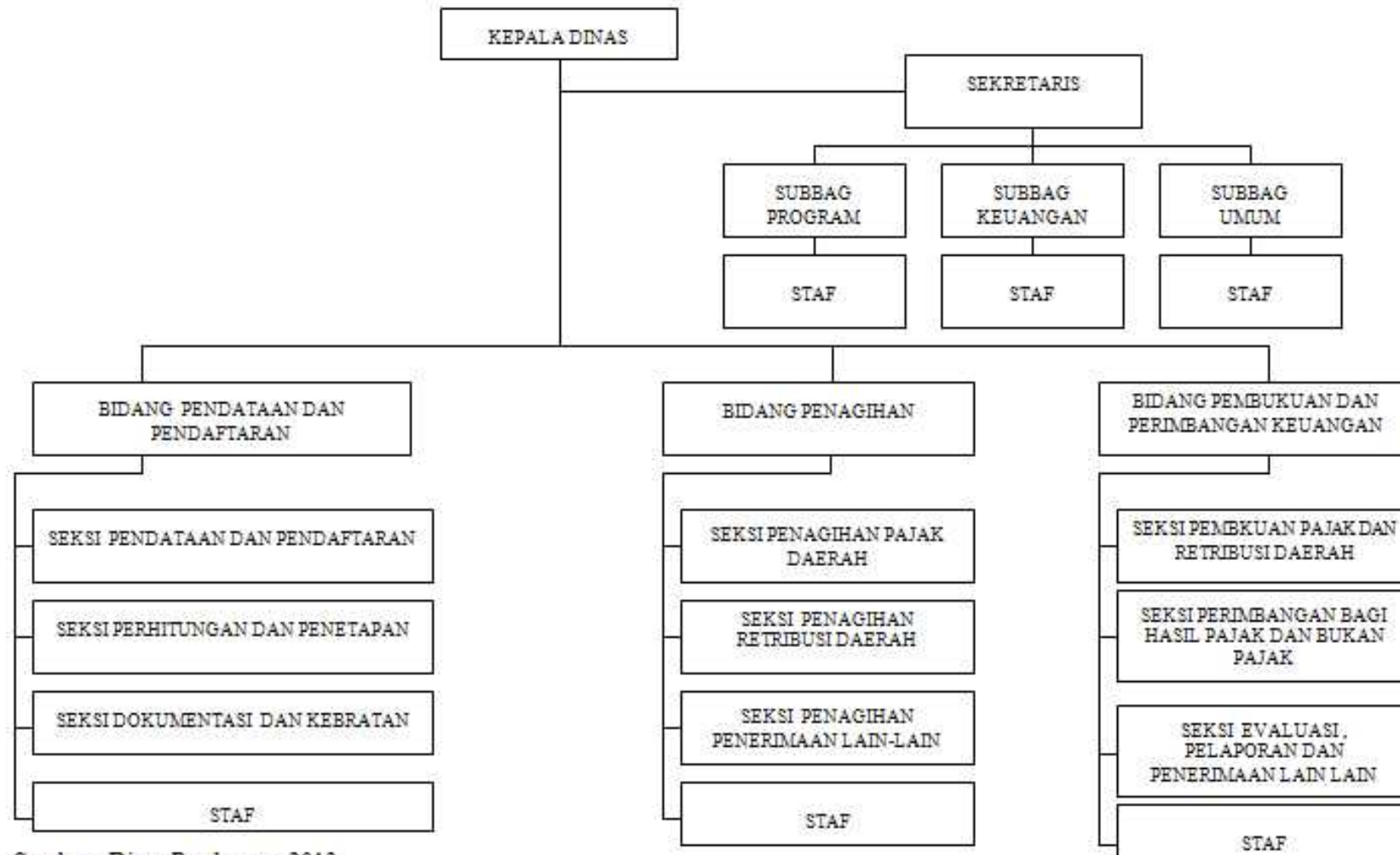
Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4), terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program

- 2) Sub Bagian Umum
- 3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan
 - 3) Seksi Dokumentasi dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penagihan Retribusi Daerah
 - 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah
 - 3) Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain.
5. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 2) Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas Pendapatan 2013

4.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu :

1. Kepala Dinas

- 1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan.
- 3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan.
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan.
 - d. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi.
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendapatan.
 - f. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.
- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan data
 - b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendapatan
 - d. Penyelenggaraan ketatausahaan
 - e. Pembinaan Kepegawaian
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana
 - g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
 - h. Penyelenggaraan fungsi kehumasan
 - i. Pengelolaan keuangan

- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Sekretaris dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagaipedomannya oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - 5) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan.
 - (1). Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan penyusunan rencana, program dan target pendapatan daerah, pengendalian administrasi dan teknis pendapatan daerah
 - (2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.

- (3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

- 1) Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- 2) Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan, dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan pendafteran, perhitungan dan penetapan,dokumentasi dan keberatan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 4) Kepala bidang dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala seksi terdiri dari :
- a. Seksi pendataan dan pendaftaran.
 - b. Seksi perhitungan dan penetapan.
 - c. Seksi dokumentasi dan keberatan.
- (1). Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan dan

mengolah bahan dalam mempersiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan objek dan subjek pajak dan retribusi serta melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan dan mengolah bahan dalam mempersiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan retribusi serta pengawasan pelaksanaan beban pajak dan retribusi.

- (2). Seksi Penetapan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan serta penyelenggaraan perhitungan, surat ketetapan pajak dan retribusi, besarnya angsuran pemungutan serta melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan serta penyelenggaraan penertiban, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), surat penetapan perjanjian, penyiapan arsip dan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

- (3). Seksi Dokumentasi dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan penyimpanan laporan

hasil pendataan, pemeriksaan, pendaftaran, pengawasan dan pengendalian serta penertiban terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pemungutan daerah serta melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan serta penyelenggaraan penatausahaan pelayanan keberatan atau permohonan banding wajib pajak dan retribusi.

4. Bidang Penagihan

- 1) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
- 3) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Kepala Bidang Pengihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala seksi :
- a. Seksi Penagihan Retribusi Daerah
 - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah
 - c. Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.
- (1). Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan

bimbingan pelaksanaan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah

(2). Seksi Penagihan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan retribusi daerah

(3). Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Penerimaan lain – lain.

5. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

- 1) Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain.

3) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain.
- d) Pengkoordinasian pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain.
- e) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain.

- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala seksi :
- a. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Seksi Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
 - c. Seksi evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain.
- (1). Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pencatatan semua SKP dan SKR, menghitung tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan dan tahunan.
 - (2). Seksi Perimbangan Keuangan bagi hasil pajak dan bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pendataan, pengelolaan administrasi, inventaris sumber-sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, evaluasi dan penyiapan laporan terhadap realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

- (3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, evaluasi dan menyiapkan pelaporan realisasi penerimaan daerah secara bulanan dan tahunan serta melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pendataan, pengelolaan administrasi, inventaris sumber-sumber penerimaan lain-lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, evaluasi dan penyiapan laporan terhadap realisasi penerimaan lain-lain daerah.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

- 1) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada dinas
- 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 4) Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Lain-lain

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, kepala dinas dapat menunjuk kepala sub dinas untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. Setiap pimpinan pada dinas pendapatan dapat memberikan tugas lainnya sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan bawahannya. Uraian tugas setiap dinas pendapatan disusun lebih lanjut oleh kepala dinas berdasarkan kewenangan dibidangnya.

4.5. Aktivitas Organisasi

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila UUD 1945, Negara dan pemerintahan serta bersatu padu, berwibawa, sadar akan tanggung

jawabnya, berwatak baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan aktifitasnya selalu mengikuti uraian tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan kepada masing-masing bagian. Antara satu bagian dan bagian lain tidak dicampur adukkan, ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan dan menjaga kinerja pegawai pada masing-masing bagian di Kantor Dinas Pendapatan agar berjalan dengan baik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Sistem Pemungutan, Pencatatan dan Perhitungan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah; (2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah; (3) penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah; (4) penyelenggaraan dan pengawasan pemungutan pajak daerah; (5) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan; 6) pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah; (7) pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan; (8) pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah; (9) penetapan dan pemungutan pajak

dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (10) pembinaan terhadap UPTD; (11) pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pajak Daerah.

Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang disesuaikan dengan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota beserta dengan Pencatatan dan Perhitungannya, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Objek Pajak Hotel, adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan Pembayaran, yaitu:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, dan
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain telepon, faksimil, teleks, fotokopi,

pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah:

- a) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b) Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren.
- c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel, dan
- e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah 10% (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Masa pajak adalah jangka waktu

yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

Contoh Perhitungan:

Sebuah Hotel pada bulan Januari 2013 melaporkan omzet pendapatan yang diterima dari tamu adalah sebesar Rp 75.000.000,- . Berapakah pajak yang harus disetorkan Wajib Pajak tersebut?

Jawab:

$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Tarif Pajak = 10 %, Dasar Pengenaan = Rp 75.000.000,- maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah: $10 \% \times \text{Rp } 75.000.000,- = \text{Rp } 7.500.000,-$.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Objek Pajak Restoran, adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran, yaitu :

- a. Rumah makan atau restoran
- b. Cafe
- c. Bar, dan
- d. Warung nasi

Yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering, dan

- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan, yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran atas pelayanan restoran.

Contoh perhitungan:

Sebuah Restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan perusahaan, selama 1 (satu) bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp 64.000.000,- dan dari pesanan (dus) sebesar Rp 15.000.000,- . berapakah pajak yang harus disetorkan restoran tersebut?

Jawab:

Pajak = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif pajak (10%) x Dasar Pengenaan Pajak (Rp 64.000.000,- + Rp 150.000.000,-)

= 10 % x (Rp 64.000.000,- + Rp 15.000.000,-)

= 10 % x Rp 79.000.000,- = Rp 7.900.000,-

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Objek Pajak Hiburan, adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu :

- a. Pertunjukan film
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
- c. Pemancingan
- d. Bilyar
- e. Pertandingan olahraga
- f. Obyek wisata
- g. Kolam renang
- h. Permainan atau ketangkasan
- i. Karaoke
- j. Rental atau penyewaan kaset video, vcd, dvd, mp3, dan sejenisnya
- k. Usaha kebugaran jasmani, dan
- l. Boling dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti :

- a. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hiburan yang dipergunakan oleh tamu hiburan, dan
- b. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan. Tarif pajaknya adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pertunjukan film
- b. Pertunjukan atau hiburan lain seperti kesenian, karaoke, bilyar, objek wisata, taman rekreasi dan sejenis lainnya.

Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Masa pajak adalah jangka waktu

yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

Contoh Perhitungan:

Sebuah tempat bowling, selama 1 (satu) bulan mendapat pemasukan dari penunjang sebesar Rp 2.000.000,- , berapakah pajak yang harus dibayar oleh pengusaha tersebut?

Jawab:

Pajak = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= 35 % x Rp 2.000.000,-

= Rp 700.000,-

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Objek Pajak Reklame, adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan media reklame elektronik lainnya.
- b. Reklame melekat (*sticker*).
- c. Reklame kain.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.

- g. Reklame suara.
- h. Reklame film (*slide*).
- i. Reklame peragaan, dan
- j. Reklame bando.

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, dan
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame.

Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak dan nilai strategis lokasi. Nilai jual objek pajak ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor biaya pemasangan, jenis yang dipasang, luas, ukuran, atau jumlah. Sedangkan nilai strategis lokasi ditetapkan dalam nilai presentase berdasarkan faktor-faktor lokasi, frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan, dan kelas jalan. Tarif pajaknya adalah 25% (dua puluh lima persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupate Kuantan Singingi. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa izin pemasangan reklame. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat penyelenggaraan atau pemasangan reklame.

Contoh Perhitungan:

Sebuah Perusahaan, memasang reklame billboard di Simpang Tiga dengan konten reklame penjualan produk peralatan kantor. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu) dan ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan reklame 365 hari 1 (satu) tahun.

Dari data tersebut maka:

1. Luas Reklame: $4 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$
2. Ketinggian Reklame = 9 m
3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 15%
5. Tarif Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah.
Daerah Untuk Pemasangan Reklame = Rp. 600
6. Wilayah pemasangan reklame masuk pada kelompok kawasan A.
Simpang tiga, masuk dalam kawasan Taluk Kuantan.
7. Reklame dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga :

a. Tarif Nilai Strategis (lihat tabel pasal 14) = Rp. 2.100,-

b. Tarif Nilai Jual Per m²(lihat tabel pasal 15 ayat 3) = Rp. 250.000,-

Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :

a	Tarif Nilai Strategis	Rp	2.100,-
b	Tarif Nilai Jual Objek Pajak per m ²	Rp	250.000,-
c	Nilai Strategis Reklame Lama penyelenggaraan x luas reklame x jumlah muka x tarif. 365 hri x 24 m ² x 1 muka x Rp 2.100,-	Rp	18.396.000,-
d	Nilai Jual Objek Pajak Luas reklame x jumlah muka x tarif 24 m ² x 1 muka x Rp 250.000,-	Rp	6.000.000,-
e	Nilai Sewa Reklame Nilai strategis + Nilai jual objek pajak Rp 18.396.000,- + Rp 6.000.000,-	Rp	24.396.000,-
f	Jumlah Pajak reklame Nilai sewa reklame x tarif pajak reklame Billiboard Rp 24.396.000,-	Rp	3.660.000,-
g	Jumlah tambahan pajak reklame Jumlah pajak reklame + jumlah tarif tambahan pajak (%)	Rp	0,-
h	Jumlah keseluruhan pajak reklame Jumlah pajak reklame + jumlah tambahan pajak Rp 24.396.000,- + 0	Rp	3.660.000,-

i	Retribusi penyelenggaraan reklame (IPR) Luas x tarif x lama penyelenggaraan reklame Rp 24 m ² x Rp 600,- x 365 hari.	Rp	5.256.000,-
j	Jumlah yang harus dibayarkan Jumlah pajak reklame + jumlah retribusi reklame Rp 3.659.400,- + Rp 5.256.000,-	Rp	8.916.000,-

**5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan.**

Objek Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik, yaitu penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, dan

- e. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik, kecuali dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Sedangkan tenaga listrik yang berasal bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Tarif pajaknya adalah sebesar 3% (tiga persen) untuk rumah tangga, pelayanan sosial dan bisnis, dan 9% (sembilan persen) untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal

pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Contoh Perhitungan:

- a. PLN dan Bukan PLN, non Industri (3%)

NJTL = Rp 5.000.000,-

Pajak yang harus dibayarkan = Rp 5.000.000,- x 3% = 150.000,-

- b. PLN dan bukan PLN, Industri, pertambangan minyak gas alam (8%)

NJTL = Rp 50.000.000,-

Pajak yang harus dibayarkan = Rp 50.000.000,- x 8% = Rp 1.200.000,-

**6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.**

Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :

- a. Abses
- b. Batu tulis
- c. Batu setengah permata

- d. Batu kapur
- e. Batu apung
- f. Bentonit
- g. Batu permata
- h. Dolomite
- i. Feldspar
- j. Garam batu (halite)
- k. Grafit
- l. Andesit, dan sejenis lainnya.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas, dan
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan untuk komersial.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai Jual pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender.

Cara Perhitungan:

$$\text{Pajak} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Objek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat non komersial, peribadatan, pemadam kebakaran, dan penggunaan oleh Pemerintah.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Daerah. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.

Contoh Perhitungan:

Sebuah Perusahaan A melakukan pengambilan Air Tanah dengan NPA sebesar Rp 10.854.120,- Berapakah Pajak yang harus disetorkan WP tersebut?

Jawab:

Cara perhitungan pajaknya:

Pajak = tarif pajak x dasar pengenaan

Tarif Pajak = 20%

Dasar pengenaan (NPA) = Rp. 10.854.120,-

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut

adalah : $20\% \times \text{Rp. } 10.854.120,- = \text{Rp. } 2.170.824,-$

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

ObjekBPHTB adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

a. Pemindahan hak karena :

1. Jual beli.
2. Tukar menukar.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Waris.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
8. Penunjukan pembeli dalam lelang.
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Penggabungan usaha.
11. Peleburan usaha.
12. Pemekaran usaha.
13. Hadiah.

b. Pemberian hak baru meliputi :

1. Kelanjutan pelepasan hak.

Di luar pelepasan hak. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun;

f. Hak pengelolaan.

Objek pajak tidak kena pajak BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kegiatan umum;
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah dengan pemberi Hibah wasiat, termasuk suami/isteri, nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :

- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. Hibah adalah nilai pasar;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian nilai baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. Hadiah adalah nilai pasar;
- o. Penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi selain berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan atau dikenal sebagai cara *official assessment system* juga dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dikenal sebagai cara *self assessment system*. Namun dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu sistem lagi sistem pemungutan pajak yakni *with holding system*. Mekanisme dalam *with holding system* menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat sehingga fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bab I diatas, dibawah ini akan dijelaskan pembahasan dari masalah-masalah tersebut:

Pertama, tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak dalam membayar kewajibannya, hal ini dapat terjadi karena hal-hal berikut ini:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak(*Self Assessment System*).

- 1) Dilihat dari proses Pendaftaran dan Pendataan

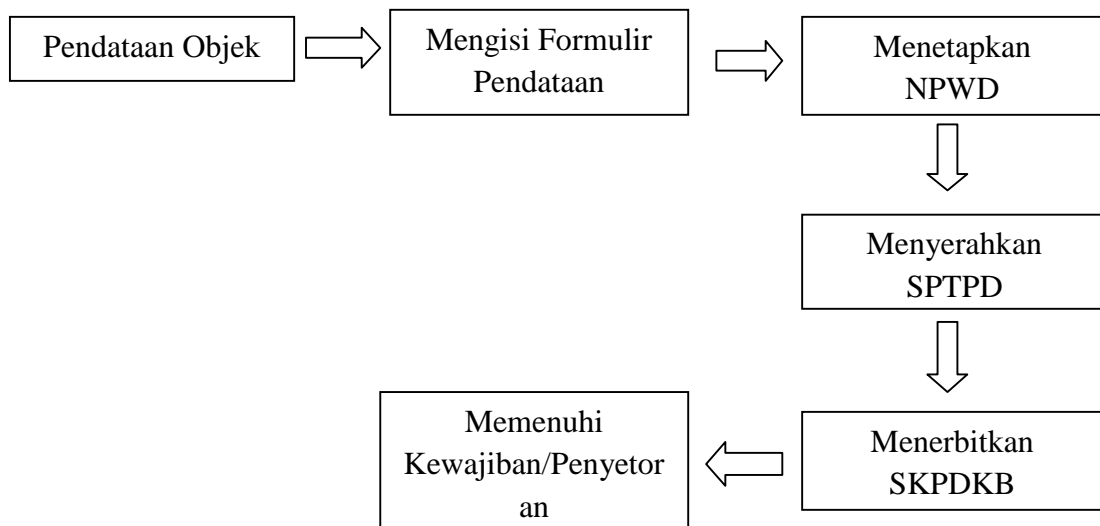
Wajib pajak daerah wajib melaporkan jenis usahanya kepada Bupati Kuantan Singingi. Dalam praktek umumnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenis pajak daerah tersebut. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Adapun rangkaian sistem penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dimulai dari pendaftaran dan pendataan, sampai dengan penagihan dan pemungutan. Sistem pemungutan pajak daerah mempunyai tahapan-tahapan atau rangkaian secara sistematis dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang dikelola oleh Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan optimal agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan dapat meningkatkan penerimaan dari setiap jenis pajak daerah tersebut.

Diawali dengan Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kemudian pada tahap berikutnya tahap pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan pajak, pembukuan dan pelaporan, dan tahap terakhir adalah pembayaran dan pemungutan/penagihan yang kemudian semua penerimaan pajak daerah masuk ke dalam kas daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut Proses pendaftaran dan pendataan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.1. : SkemaProses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.



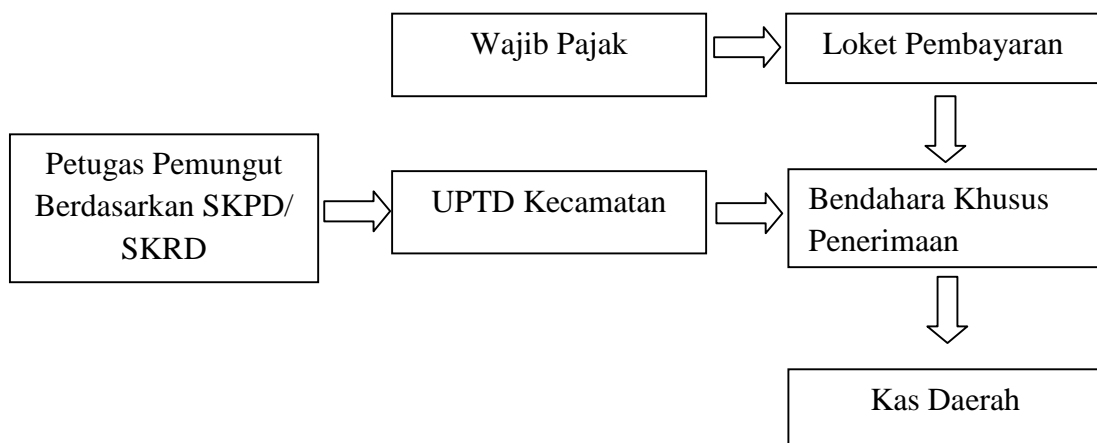
Menurut salah seorang pegawai Dipenda yang bertugas sebagai juru pungut mengatakan bahwa sebagian besar dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, mereka tidak melaporkan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dipenda, sehingga wajib pajak hanya menunggu petugas yang akan mendata dan memberi formulir pendaftaran. Dan apabila petugas tidak mendata secara langsung ke lapangan maka ada kemungkinan wajib pajak tidak akan dikenai pajak.

Dengan demikian, kecenderungan ini akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan daerah yang mana apabila petugas tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan membiarkan hal tersebut terjadi maka ada kemungkinan setiap jenis pajak daerah tidak terjaring pajak.

2) Pemungutan dan Penagihan

Dalam proses pemungutan pajak daerah yaitu terdapat 2 (dua) cara. Cara yaitu wajib pajak langsung menyetor kewajibannya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) melalui loket pembayaran yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian cara yang kedua yaitu petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemungutan dengan berdasarkan SKPD kemudian UPTD. Setelah dilakukan pemungutan pajak tersebut maka disetorkan kepada bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan menunjukkan bukti setoran tersebut dan disampaikan ke bidang pembukuan. Pada umumnya pemungutan yang dilakukan berdasarkan SKPD dilakukan UPTD kecamatan, sedangkan pemungutan yang dilakukan secara langsung oleh wajib pajak disetorkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 5.2. : Skema Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.



Apabila pajak daerah yang terutang tersebut tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka petugas yang ditunjuk akan melakukan penagihan pajak. Dalam melakukan proses penagihan dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah.

Tujuan dari pelaksanaan penagihan adalah sebagai proses usaha penegakan hukum agar wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah, wajib pajak dikenakan denda 2% perbulannya. Pembayaran yang benar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran. Tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebelum tanggal 20 pada bulan depan, apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah.

Dari penjelasan diatas, sistem pemungutan dan penagihan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan optimal, ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak berjalan dengan baik dalam melakukan pemungutan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak berada ditempat.
2. Wajib pajak selalu menunda pembayaran jatuh tempo.
3. Wajib pajak mengajukan keberatan.

Tidak lancarnya pemungutan pajak daerah tersebut Semua itu dapat dilihat pada penerimaan realisasi Pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan BPHTB yang tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Sistem Pemungutan Pajak berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment System*).

Pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) merupakan salah satu alternatif dalam pemungutan pajak daerah disamping terdapat cara pemungutan lain, yaitu dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut:

1) Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada wajib

pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan dalam pelayanan kepada wajib pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Selanjutnya apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pokok pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka pada Perhitungan dan Penetapan Pajak terutang oleh Pejabat ditegaskan sebagai berikut :

“ Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang, atau sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak belum menyampaikan SPTPD, maka Bupati atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.” Dari kutipan tersebut dapat diartikan, bahwa wajib pajak tidak memperhitungkan atau menetapkan sendiri pokok pajak terutang, berarti

bahwa wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam batasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak, wajib pajak mempunyai SPTPD, maka terhadap hal tersebut oleh Bupati diterbitkan SKPD sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, maka kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah dimana Wajib Pajak membayar sendiri, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dan wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tersebut Wajib Pajak melakukan penghitungan dan menetapkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem pemungutan jenis ini, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah diberikan hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

3) Pemungutan dan Penagihan

Pemungutan Pajak Daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan

penyampaian surat paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang.

4) Pembukuan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib pajak harus disimpan selama lima tahun, dan mekanisme pemungutan pajak daerah jenis yang diatas tersebut dipungut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam sistem ini, adanya ketidak lancaran dalam pemungutan pajak daerah disebabkan pihak yang bertugas sebagai pemungut pajak tidak berupaya dalam menjalankan tugasnya dalam memungut pajak sehingga masih terdapat pajak yang pemungutannya tidak sesuai dengan semestinya yang menyebabkan penerimaan realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat disebabkan karena tidak adanya personil yang tetap yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan sanksi terhadap pihak yang tidak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Kedua, tidak konsistennya antara pemungutan pajak daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur pajak daerah.

Padahal di dalam Perda No. 02 Tahun 2011 Hotel telah dijelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel yaitu:

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Merupakan upaya pengumpulan data, penyusunan data dan informasi mengenai wajib pajak, subjek pajak, objek pajak dan jasa penunjang kelengkapan hotel secara objektif oleh Dinas Pendapatan Kuantan Singingi, yang termasuk fasilitas penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, laundry, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Seluruh wajib pajak hotel yang berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi wajib didaftar dan mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Apabila ditemukan kesalahan maka pihak Dispenda akan turunkan kelapangan untuk mendata sendiri fasilitas penunjang yang ada di hotel tersebut.

2. Penetapan pajak

Merupakan upaya menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang harus dilunasi paling lama (30) tiga puluh hari sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penetapan pajak hotel dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dikeluarkannya.

3. Pembayaran pajak

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak hotel sebelum tanggal jatuh tempo dengan

membawa bukti rekapitulasi penjualan selama satu bulan yang telah diberikan oleh petugas Dipenda sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat ke dalam buku penerimaan, setelah membayarnya maka wajib pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak. Apabila setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum membayarkan kewajibannya maka akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang harus dibayar.

4. Penagihan pajak

Merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menagih pajak hotel yang terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak terhitung setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan ini diawali dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak. Apabila setelah 7 hari wajib pajak masih belum membayar kewajibannya maka akan dikeluarkan surat paksa selambat-lambatnya setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak yang bertugas dalam memungut pajak sehingga pemungutan pajak diabaikan tanpa menganalisa peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya pemerintah kabupaten kuantan singingi bisa menetapkan petugas yang benar-benar mengerti dan memahami tata cara pemungutan dan pelaksanaan pajak daerah sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi akibat dari pihak petugas itu sendiri. Untuk menghindari hal-hal tersebut dapat dilakukan beberapa cara:

1. Dalam meningkatkan pemahaman pihak petugas pemungut pajak terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturan-aturan pendukung pemungutan pajak daerah secara berkesinambungan dengan bentuk sosialisasi yang tepat, sehingga menciptakan pemahaman yang utuh atas ketentuan-ketentuan yang dirumuskan.
2. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah hendaknya menugaskan pegawai yang benar-benar mampu memahami dan menjalankan aturan-aturan dari pemerintah daerah itu sendiri karena jika kurang tepat akan menimbulkan permasalahan yang akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ketiga, tidak dipungutnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sama halnya dengan pembahasan yang diatas, dengan kelalaian petugas dalam memungut pajak, akan mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak dapat mencapai hasil yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi. Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi, karena jalannya roda pemerintahan itu juga bergantung pada pemungutan pajak di daerah tersebut.

Keempat, tidak dipungutnya Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang ketiga jenis pajak tersebut, sesuai dengan hasil Perda yang telah di dapat penulis dari pihak secara langsung pada kantor tempat penelitian tersebut, bahwa hanya terdapat 8 (delapan) jenis Perda yang baru ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun hal lain yang menyebabkan tidak dipungutnya pajak tersebut dilihat dari kenyataannya di kabupaten kuantan singingi tersebut tidak terdapat burung walet.

5.2.Kendala-kendala yang dapat melemahkan pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, namun karena belum dikelola secara memadai maka pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi belum tercapai dengan baik. Dengan demikian, ada beberapa kendala-kendala yang dapat melemahkan pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

2. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.

Daerah Kabupaten dan Kota telah diberikan wewenang untuk menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya ialah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung atau tidak langsung) , kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana (kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis melemahkan pemungutan pajak.

4. Kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah. Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat untuk menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantinya dapat

menimbulkan konflik antarpusat dan daerah atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur. Pengawasan oleh Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasaan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan budaya masing-masing.

5. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.

6. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

7. Tidak konsistennya antara Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri dalam pemungutan pajak. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman

baik itu dari masyarakat wajib pajak dalam membayar kewajibannya maupun dari petugas itu sendiri yang kurang memahami Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengenai masalah analisis pemungutan pajak daerah, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan penelitian dan pembahasan tersebut. Selanjutnya dari hasil kesimpulan akan mengemukakan saran-saran yang berkemungkinan akan berguna bagi pihak yang berkepentingan.

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah dilihat dari sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi belum tercapai dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini :

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD

Sistem pemungutan pajak daerah yang kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan Perundang-undangan tentang pajak daerah tersebut, mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan

sistem pemungutan berdasarkan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri.

1. Dilihat dari proses pendaftaran dan pendataan yang belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian besar dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak melaporkan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sehingga wajib pajak hanya menunggu petugas yang akan mendata dan memberi formulir pendaftaran. Dan apabila petugas tidak mendata secara langsung ke lapangan maka ada kemungkinan wajib pajak tidak akan dikenai pajak.
2. Selain proses pendaftaran dan pendataan, faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak lancarnya pemungutan pajak daerah yaitu wajib pajak tidak berada ditempat pada saat petugas melakukan pemungutan, Wajib pajak selalu menunda pembayaran jatuh tempo, dan Wajib pajak mengajukan keberatan.
3. Kurangnya pemahaman dari pihak yang bertugas dalam memungut pajak sehingga pemungutan pajak diabaikan tanpa menganalisa peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya pemerintah kabupaten kuantan singingi bisa menetapkan petugas yang benar-benar mengerti dan memahami tata cara pemungutan dan pelaksanaan pajak daerah sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi akibat dari pihak petugas itu sendiri.

2. Kendala-kendala yang dapat melemahkan Pemungutan Pajak daerah.

Beberapa Kendala-kendala yang sangat melemahkan pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- b. Pemberian izin, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum pajak daerah yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- c. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.
- d. Kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah.
- e. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.
- f. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.
- g. Kurangnya tidak konsistennya antara peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dengan keadaan yang sebenarnya.

6.2. Saran

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana digambarkan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pajak daerah perlu menegaskan sistem pemungutannya pada setiap jenis pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menugaskan pegawai yang benar-benar memahami konsep dari Peraturan Daerah.

2. Petugas yang ditunjuk untuk memungut pajak daerah hendaknya memikul amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab serta kesadaran yang tinggi, sehingga pemungutan tercapai secara maksimal dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Perlu meningkatkan motivasi kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pemungutan pajak daerah.
4. Dalam meningkatkan pemahaman pihak petugas pemungut pajak terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya dilakukan sosialisasi terhadap pihak tersebut atas aturan-aturan pendukung pemungutan pajak daerah secara berkesinambungan dengan bentuk sosialisasi yang tepat, sehingga menciptakan pemahaman yang utuh atas ketentuan-ketentuan yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Guntur. 2011. *Analisis Pemungutan Pajak Restoran untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Faridl,miftah. 2002. *Harta dalam Perspektif Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haula, Rosdiana,2005. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Bruton. 2008. *Hukum Pajak Edisi Empat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009.Yogyakarta: CV. ANDI.
- Mufraini,M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Penerbit Kencana Perdana Media Group.
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rositawati, Rona. 2009. *Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)*. Skripsi : Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiawan, Agus & Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supramono. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Waluyo, Ilyas. B. Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Salemba Empat.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yani, Melda. 2012. *Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Kampar*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 tent
Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 28 dan Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.